



Analisis Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia

Naufal Juniyar¹, Firsty Ramadhona Amalia Lubis^{1*}, Lustina Fajar Prastiwi², Rossy Dwi Anita³

¹ Universitas Ahmad Dahlan

² Universitas Negeri Malang

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

naufal1800010267@webmail.uad.ac.id; firsty.ramadhona@ep.uad.ac.id; lustina.prastiwi.fe@um.ac.id; dwianitarossy@gmail.com

Abstrak: Inklusi keuangan merupakan isu global karena mempengaruhi perekonomian dan adanya fakta bahwa akses layanan keuangan di negara berkembang masih rendah. Inklusi keuangan Indonesia dikategorikan masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Penerapan inklusi keuangan masih mengalami hambatan karena masih terbatasnya bank yang terdekat dengan tempat tinggal dan jauhnya jarak cabang terdekat. Kebijakan dari Pemerintah Indonesia telah menetapkan pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Program tersebut dimaksudkan untuk membantu otoritas publik dengan mengurangi kemiskinan dan mendorong ekonomi yang komprehensif dan layak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan salah satunya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan penanaman modal dalam negeri terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS dan OJK serta diuji menggunakan regresi data panel. Alat yang digunakan untuk melakukan uji tersebut adalah *software* STATA 14. Hasil yang diperoleh variabel kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.

Kata kunci: Inklusi Keuangan; Pertumbuhan Ekonomi; Ketimpangan Pendapatan

*Correspondence: Firsty Ramadhona Amalia Lubis

Email: firsty.ramadhona@ep.uad.ac.id

Received: 01 Nov 2023

Accepted: 29 Nov 2023

Published: 30 Nov 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

poverty, income inequality and domestic investment have a significant effect on financial inclusion, while the variables of economic growth and unemployment have no significant effect on financial inclusion.

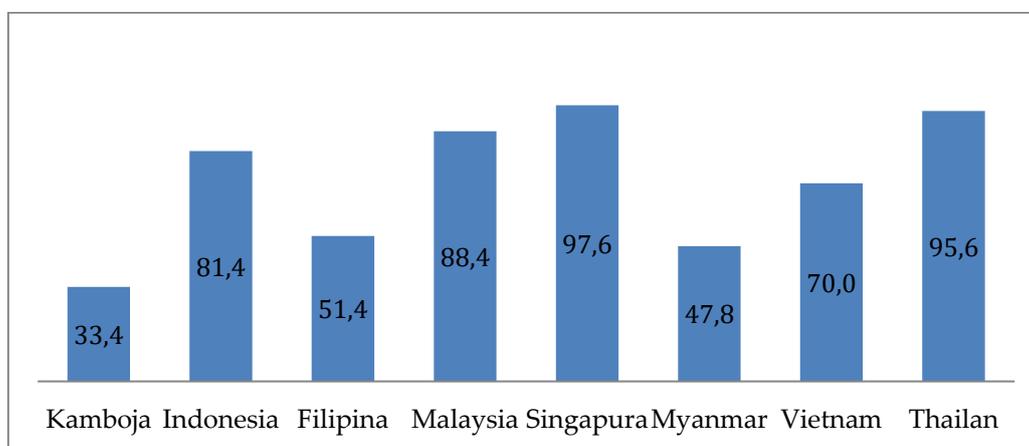
Keywords: Financial Inclusion; Economic Growth; Income Inequality

Abstract: Financial inclusion is a global issue because it affects the economy and the fact that access to financial services in developing countries is still low. Indonesia's financial inclusion is categorized as low when compared to other ASEAN countries. The implementation of financial inclusion is still experiencing obstacles due to the limited number of banks closest to the place of residence and the distance of the nearest branch. The policy of the Government of Indonesia has established the National Strategy for Financial Inclusion (SNKI) through Presidential Regulation No. 82/2016. The program is intended to help public authorities by reducing poverty and encouraging a comprehensive and viable economy. Therefore, this study has one of its objectives to determine the effect of economic growth, poverty, unemployment, income inequality, and domestic investment on financial inclusion in Indonesia. This study was conducted in 34 provinces in Indonesia, the data used was secondary data obtained from BPS and OJK and tested using panel data regression with STATA 14. The results obtained by the variables of poverty, income inequality and domestic investment have a significant effect on financial inclusion, while the variables of economic growth and unemployment have no significant effect on financial inclusion.

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (2016) menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan isu global karena mempengaruhi perekonomian dan adanya fakta bahwa akses layanan keuangan di negara berkembang masih rendah. Kementerian Keuangan Indonesia mendefinisikan inklusi keuangan merupakan keadaan dimana anggota warga mempunyai akses terhadap layanan keuangan resmi yang bermutu secara pas waktu, mudah serta terjangkau dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuannya dalam rangka menaikkan kesejahteraan warga. Akyuwen & Waskito (2018), mengartikan inklusi keuangan yaitu membagikan layanan keuangan kepada kelompok warga berpenghasilan rendah. Tujuan utamanya yakni akses ke layanan keuangan guna menaikkan standar hidup serta pemasukan yang lebih baik.

Penerapan inklusi keuangan untuk lembaga keuangan perbankan masih mengalami beberapa hambatan, yaitu tidak terdapatnya bank yang dekat dengan tempat tinggal ataupun jauhnya jarak ke cabang terdekat. Lebih lanjut, hambatan yang dihadapi warga dapat berupa tingkatan uraian pengelolaan keuangan masih kurang. Hambatan yang dialami lembaga keuangan perbankan berupa terbatasnya *coverage* zona dalam melaksanakan ekspansi jaringan kantor. Di sisi lain, untuk menaikkan jaringan kantor ke wilayah terpencil, bank mengalami permasalahan bayaran *set-up* yang relatif besar (Waedhono, Indrawati, & Qori'ah, 2018).



Gambar 1. Perbandingan Inklusi Keuangan Di Negara ASEAN Tahun 2020

Inklusi keuangan di negara ASEAN tahun 2020 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand mendominasi nilai inklusi keuangan dengan nilai diatas 70.0%. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan cocok untuk diterapkan di negara berkembang. Indonesia ialah salah satu negara yang mempunyai permasalahan kemiskinan. Dengan demikian, inklusi keuangan ialah perihai yang sangat berarti diterapkan di Indonesia. Manfaat yang didapat dari terdapatnya inklusi keuangan ialah bisa mendesak perkembangan pemasukan yang besar, sehingga berdampak terhadap penyusutan tingkatan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Senyo & Osabutey, 2020).

Negara dikatakan mempunyai tingkatan inklusi keuangan yang besar bila kebanyakan penduduknya sudah memakai ataupun memakai bermacam produk serta jasa keuangan, semacam menabung ataupun memperoleh kredit dari bank. Memperluas inklusi keuangan merupakan upaya strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menanggapi tantangan pembangunan lintas negeri (Akyuwen & Waskito, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses perbankan oleh masyarakat miskin berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, percepatan pertumbuhan secara keseluruhan, peningkatan efisiensi alokasi modal, dan peningkatan akses terhadap kredit produktif.

Forum *Leaders Summit* (2012), dalam organisasi G20 dikeluarkannya *Financial Peer Learning Program (FPLP)* dan *Global Partnership on Financial Inclusion (GPII)* untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh forum tersebut bertujuan memperluas akses pendanaan formal kepada semua kalangan, terutama mereka yang kesulitan mengakses pendanaan formal. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan memfokuskan pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Program ini dimaksudkan untuk membantu otoritas publik dengan mengurangi kemiskinan dan mendorong ekonomi yang komprehensif dan layak (Ummah & Anggraeni, 2015). Strategi tersebut diharapkan dapat menjadi strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Inklusi keuangan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya peran inklusi keuangan, terutama di masa pandemi Covid-19, tren positif ini akan berlanjut pada tahun selanjutnya dan memutuskan untuk mempercepat penerapan inklusi keuangan guna pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terletak pada kisaran 5 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19, perkembangan ekonomi menghadapi kontraksi sebesar -2,07 persen. Menurunnya data pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdampak terhadap jumlah penduduk miskin, meningkatnya tingkat pengangguran, dan semakin tingginya kesenjangan pendapatan di Indonesia. Inklusi keuangan bisa dijadikan strategi penyediaan akses layanan yang terjangkau untuk warga miskin secara langsung serta jadi agen perkembangan ekonomi (Sanjaya, 2014).

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait inklusi keuangan yang mampu meningkatkan akses keuangan terhadap layanan keuangan seperti yang dilakukan oleh (Allen, Demirguc-Kunt, Klapper, & Peria, 2016); (Dwi & Erlando, 2018); (Park & Mercado, 2015); (Dixit & Ghosh, 2013); (Sanjaya, 2014); (Ummah & Anggraeni, 2015). Peneliti tersebut juga mengungkapkan bahwa inklusi keuangan dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Akyuwen & Waskito, 2018); (Beck, Demirguc-Kunt, & Levine, 2007), pengangguran (Wahab, Qarina, Syariati, & Aprinandhi, 2022), serta ketimpangan pendapatan (Tsuroyya, 2022); (Haloho, 2019). Selain itu, dampak positif dari adanya inklusi keuangan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang mana memainkan peran dengan adanya peluang untuk berpartisipasi serta menjadi agen dari perkembangan sektor

keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu penggunaan variable pertumbuhan ekonomi dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai variable control atas meningkatnya inklusi keuangan. Sehingga, melalui kedua variable tersebut digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap menurunnya Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Kontribusi penelitian berupa estimasi atas determinan inklusi keuangan melalui perubahan variable pertumbuhan ekonomi dan PMDN guna menurunkan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi yang pasti menggunakan strategi kuantitatif atau deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) riset deskriptif merupakan pengecekan ekspresif yang mengharapkan buat membagikan ataupun menguasai kondisi ataupun kekhasan yang terjalin dengan memakai metodologi logis buat menjawab persoalan asli. Unit analisis data dalam penelitian ini berfokus pada 34 Provinsi di Indonesia dengan dimensi waktu yang digunakan yaitu data panel. Penelitian ini menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui pencarian dan pengumpulan data dan informasi, yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang bukan manajemen tetapi dapat dimanfaatkan untuk penelitian tertentu atau melalui saluran mediasi.

Data sekunder dari sumber internal dan eksternal Statistik dari BPS dan OJK, khususnya data tentang inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan PMDN pada tahun 2016 hingga 2020, digunakan untuk membuat data sekunder internal. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data pihak ketiga dari publikasi, majalah, dan situs web. Adapun, persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Inklusi keuangan merupakan variable dependen dalam penelitian ini yang dinyatakan dalam satuan indeks. Sedangkan, untuk variable independent berupa pertumbuhan ekonomi (%), kemiskinan (ribu jiwa), pengangguran (%), ketimpangan pendapatan (indeks), dan PMDN (rupiah).

Pengujian data panel dimulai dengan pemilihan model terbaik Widarjono (2013) yang dilakukan dengan cara melakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow dilakukan untuk menguji model Comman Effect dan Fixed Effect. Uji Hausman digunakan untuk menguji antara model Random Effect dan Fixed Effect. Sedangkan, Uji LM digunakan ketika Uji Chow dan Uji Hausman memiliki perbedaan hasil. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik berupa uji heterokedastisitas dan multikolinieritas.

Uji heterokedastisitas menggunakan *Breusch-Pagan/Cook and Weisberg's test* dimana dari hasil data olahan nilai $\text{Prob} > \chi^2$ kurang dari α maka model terdapat masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 2013). Sedangkan, uji multikolinieritas dapat memanfaatkan VIF. Jika nilai $\text{VIF} < 10$ maka tidak ada efek samping multikolinearitas (Widarjono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan membagikan data tentang variabel riset semacam inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, serta penanaman modal dalam negara di Indonesia. Berdasarkan uji spesifikasi model menggunakan uji Chow, nilai probabilitas yang kurang dari nilai signifikansi 5%, yaitu 0,0023 hal ini dapat menjelaskan bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect Model*. Dari uji Hausman menunjukkan angka probabilitas ialah sebesar 0,0015 nilai tersebut lebih kecil dibanding tingkatan signifikansi sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak serta menerima H_1 , yang berarti model yang terbaik dalam penelitian ini merupakan *Fixed Effect Model*. Kedua uji menunjukkan pilihan terbaik menggunakan model eksplorasi model efek tetap (*Fixed Effect*). Sehingga tidak perlu dilakukan uji LM sebagai uji lanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji asumsi klasik.

Tabel 1 Pemilihan Model Terbaik

Test	Probabilitas	Hasil
Chow	0.0023	Fixed Effect
Hausman	0.0015	Fixed Effect

Variabel bebas dikatakan bebas dari *heteroskedastisitas* jika $\text{Prob} > \chi^2$ lebih besar dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar $0,0000 < 0,05$, yang berarti terdapat tanda-tanda *heteroskedastisitas*, tetapi dalam hal ini data disembuhkan dengan kuat dengan metode *robust*. Sedangkan, hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai mean VIF sebesar $1.22 < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	1/VIF
Kemiskinan	1.39	0.717826
PMDN	1.36	0.737605
Pengangguran	1.13	0.884194
Ketimpangan Pendapatan	1.10	0.908942
Pertumbuhan Ekonomi	1.10	0.910491
Mean VIF	1.22	

Pengujian F-statistic menunjukkan nilai sebesar 0.023 lebih kecil dari 0,05. Sehingga, secara simultan variable independent mempengaruhi inklusi keuangan. Pada uji koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan hasil garis regresi yang dibentuk sesuai data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,2844. Artinya bahwa sebesar 28,44 persen variable inklusi keuangan di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan PMDN. Sementara itu, secara persial pada masing-masing variable menunjukkan hasil yang berbeda. Adapun hasil tersebut seperti pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Uji Persial

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	-0.0036133	-1.63	0.113	Tidak Signifikan
Kemiskinan	-0.000046	-1.84	0.074	Signifikan
Pengangguran	-0.0118097	-1.23	0.229	Tidak Signifikan
Ketimpangan Pendapatan	-1.493907	-2.51	0.017	Signifikan
PMDN	0.019346	2.51	0.017	Signifikan
C	1.238612	6,04	0,000	Signifikan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap inklusi keuangan menghasilkan nilai signifikansi $0.113 > 0.05$ dengan nilai t-statistik sebesar -1,63. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan. Pengaruh kemiskinan terhadap inklusi keuangan menghasilkan nilai signifikansi $0,074 < 0.05$ dengan nilai t-statistik sebesar -1,84. Hal ini berarti kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Pengaruh pengangguran terhadap inklusi keuangan menghasilkan nilai signifikansi $0,229 > 0.05$ dengan nilai t-statistik sebesar -1,23. Hal ini berarti pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan.

Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan menciptakan nilai signifikansi $0,017 < 0.05$ dengan nilai t-statistik sebesar -2,51. Perihal ini berarti ketimpangan pendapatan mempengaruhi negatif serta signifikan terhadap inklusi keuangan. Pengaruh PMDN terhadap inklusi keuangan menciptakan nilai signifikansi $0,017 < 0.05$ dengan nilai t-statistik sebesar 2,51. Perihal ini berarti PMDN mempengaruhi positif serta signifikan terhadap inklusi keuangan. Dari 34 Provinsi di Indonesia periode tahun 2016-2020. Bahwa Provinsi Jawa Barat ialah Provinsi dengan tingkat Inklusi Keuangan yang paling tertinggi sebesar 0.1167624. Sedangkan Provinsi dengan tingkat inklusi keuangan terendah berada di provinsi Bangka Belitung sebesar -0.3124827.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap inklusi keuangan yang tidak signifikan dikarenakan ekonomi Indonesia di tahun 2020, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% di mana pandemi Covid-19 turut memukul perekonomian. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, penyebab utama dari menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah tidak terlepas dari dampak penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pada kegiatan

perekonomian di Indonesia, baik dari sisi produksi, distribusi serta pada bagian konsumsi, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) maupun kegiatan investasi (Tsuroyya, 2022).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatinnisa, Fauziah, Trivena, & Aini, 2021). Hasil dari Uji hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia, baik secara parsial maupun secara parsial serentak. Hal ini menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan meningkat Indonesia perlu ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan inklusif sebagai yang utama sasaran (Hidayatinnisa, Fauziah, Trivena, & Aini, 2021). Kim dalam (Pratama, 2020), inklusi keuangan di sini telah gagal meningkatkan pendapatan banyak orang secara efektif dan mengurangi hambatan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi melambat, hal ini juga akan mengurangi inklusi keuangan (Ningrum, 2018; Khoirunnisa, 2019).

Pengaruh kemiskinan terhadap inklusi keuangan yaitu negative. Hasil ini konsisten dengan penelitian Honohan dalam (Soetiono & Setiawan, 2018), dengan menggunakan data dari 160 negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses keuangan berdampak secara negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian Dwi & Erlando (2018), Ningrum (2018) dan (Kusuma & Indrajaya, 2020), hasil riset menampilkan kalau inklusi keuangan berakibat negatif terhadap kemiskinan, maksudnya ketika inklusi keuangan semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Perihal ini bisa dimaksud kalau sektor keuangan bisa berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan lewat partisipasi pemerataan.

Pengaruh pengangguran terhadap inklusi keuangan yaitu negatif. Hal ini dikarenakan adanya PHK besar-besaran terjadi di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 dan peningkatan jumlah aksesibilitas keuangan justru menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Hal ini disebabkan, peningkatan jumlah kantor bank tidak dibarengi dengan penurunan angka pengangguran. Di Indonesia relatif lebih banyak perusahaan yang padat karya dibandingkan perusahaan padat modal (Pangeran & Subambang H, 2021). Hasil ini sejalan dengan penelitian Dwi & Erlando (2018), mengkaji di Kawasan Timur Indonesia ditemui hasil riset jika pengangguran tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Analisis ini mirip dengan penelitian Khoirunnisa (2019), dimana pengangguran tidak mempengaruhi inklusi keuangan, karena semakin tinggi tingkat pengangguran maka inklusi keuangan semakin rendah.

Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan yaitu negative. Hasil ini konsisten dengan penelitian Dwi & Erlando, (2018), variabel ketimpangan pendapatan mempengaruhi negatif serta signifikan terhadap inklusi keuangan. Maksudnya, Pemerataan pendapatan menciptakan sumber ekonomi baru di daerah, secara otomatis meningkatkan ketersediaan lembaga keuangan, dan meningkatkan kesempatan penduduk untuk mengakses keuangan. Bila terjadi kenaikan inklusi keuangan, perihal ini bisa kurangi ketimpangan pendapatan, perihal ini diakibatkan terus menjadi besarnya akses warga terhadap layanan perbankan sehingga mempermudah warga dalam melaksanakan proses transaksi yang efektif (Gustiwiguna, 2020).

PMDN memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Sejalan dengan hasil tersebut, (Banerjee, Donato, & Maruta, 2020) dan (Sheraphim, 2018) bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Artinya dengan meningkatnya investasi dalam negeri, ketersediaan jasa keuangan akan meningkat. Berdasarkan BKPM (2020), untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, diperlukan investasi (baik asing maupun domestik) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi. Kebutuhan investasi dibiayai dengan pendalaman sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, antara lain melalui perluasan akses layanan keuangan, perluasan produk keuangan yang inovatif, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan penanaman modal dalam negeri terhadap inklusi keuangan di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan negative pada variable pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan. Sedangkan, variable PMDN memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Atas hasil tersebut, maka rekomendasi yang diberikan berupa pemahaman pentingnya pendidikan dan pengetahuan mengenai aspek keuangan (*financial education* dan *financial literacy*). Dari sisi ketimpangan pendapatan, pemerintah harus melakukan pemerataan pendapatan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sedangkan, dari sisi PMDN dapat dilakukan dengan cara investor, pemerintah, serta bank bisa bekerja sama buat tingkatkan seluruh aspek inklusi keuangan, misalnya lewat mekanisme distribusi/intermediasi, pinjaman murah, serta kemudahan akses untuk pengusaha kecil yang memerlukan modal yang nantinya akan berdampak terhadap kenaikan pendapatan modal dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Peria, M. S. (2016). The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1-30. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
- Banerjee, R., Donato, R., & Maruta, A. A. (2020). The Effect of Financial Inclusion on Development Outcomes: New Insights from ASEAN and East Asian Countries. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*, 342, 1-53.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality and The Poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49. doi:<https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
- BKPM. (2020). *Rencana Strategis BKPM*. Jakarta: Indonesia Investment Coordinating Board.

- Dixit, R., & Ghosh, M. (2013). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India- A Study of Indian States. *International Journal of Business Management & Research*, 3(1), 147-156.
- Dwi, F., & Erlando, A. (2018). Model Inklusif Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). *Journal of Universitas Airlangga*, 1-15.
- Gustiwiguna, T. I. (2020). *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Negara Middle Income*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Haloho, D. R. (2019). *Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan Dengan Pemerataan Pendapatan, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hidayatinnisa, N., Fauziah, Trivena, S. M., & Aini, Y. N. (2021). The Effect of Financial Literacy and Financial inclusion on Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Perbankan*, 7(2), 339-359. doi:<https://doi.org/10.21070/jbmp.v7i2.1539>
- Khoirunnisa, I. (2019). *Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Inklusi di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Kusuma, A. A., & Indrajaya, I. G. (2020). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(5), 963-1199.
- Ningrum, D. K. (2018). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan di Jawa Timur Periode Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(1), 1-16.
- Pangeran, & Subambang H. (2021). Indeks Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusi di Indonesia: Analisis Kausalitas Granger. *Jurnal Ekonomi Hukum dan Humaniora*, 3(3), 1-16.
- Park, C.-Y., & Mercado, R. V. (2015). Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series*, 1-25.
- Pratama, D. A. (2020). Analisis Pengaruh Inklusui Keuangan, Ketimpangan, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 9(2), 1-18.
- Sanjaya, I. M. (2014). *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Senyo, P., & Osabutey, E. L. (2020). Technovation Unearthing Antecedents to Financial Inclusion through FinTech Innovations. *Technovation*, 98, 102155. doi:<https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102155>
- Sheraphim, G. K. (2018). Pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Penanaman Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia Periode 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 1-22.
- Soetiono, K. S., & Setiawan, C. (2018). *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-
- Tsuroyya, I. (2022). *Pengaruh Inklusi Keuangan, PDB per Kapita, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara Berpenghasilan Menengah Ke-atas dan Ke-bawah 2008-2019*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Ummah, B. B., & Anggraeni, N. N. (2015). Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1-27. doi:<https://doi.org/10.29244/jekp.4.1.2015.1-27>
- Waedhono, A., Indrawati, Y., & Qori'ah, C. G. (2018). *Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jember: Pustaka Abadi.
- Wahab, A., Qarina, Syariati, A., & Aprinandhi, M. D. (2022). Konstruksi Variabel Makroekonomi Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. *Al-Buhuts*, 18(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.30603/ab.v18i1.2599>
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.